



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10/DPRD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang Tahun 2020 pada tanggal 22 Juli 2020, untuk dibahas di DPRD Provinsi Kalimantan Barat guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien akan dilakukan melalui mekanisme Pembentukan Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
7. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Nomor : 826/142/DPRD-B tanggal 15 Juli 2020 Hal : Usulan Nama-nama Calon Anggota Pansus;
 2. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 015/F.PDI-P/DPRD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi yang ditugaskan di Pansus;
 3. Surat Pimpinan Fraksi Partai Golkar Nomor : FPG.10/Pimp/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar dalam 2 (dua) buah Pansus DPRD Prov. Kalbar;
 4. Surat Pimpinan Fraksi Partai NasDem Nomor : 10/F.NasDem/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal usulan Nama Calon Anggota Pansus;
 5. Surat Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Nomor : 03/F.GERINDRA/DPRD-I/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal : Nama-nama Anggota Pansus;

6. Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Nomor : 09/F-PD/PANSUS-DPRD/2020 tanggal 16 Juli 2020 Hal

7. Nama-nama Calon Anggota PANSUS Raperda DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Surat Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 32/F.PAN DPRD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Hal : Nama-nama Anggota F. PAN di Pansus DPRD Provinsi Kalbar;
8. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 04/F.NKB/DPRD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal : Usulan Nama-Nama Anggota Pansus;
9. Surat Pimpinan Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera Nomor : 12/PKS-PPP/DPRD-VII-2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Usulan Nama-Nama Calon Anggota dua Pansus;
10. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus;
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan pembahasan bersama-sama dengan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2020

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

PRABASA ANANTATUR

Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama/Jabatan Pokok/Unsur Fraksi	Kedudukan Dalam Panitia Khusus
1	2	3
1.	M. Keding L (Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov. Kalbar)	Koordinator
2.	Ir. H. Prabasa Anantatur, MH (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi Partai Golkar DPRD Prov. Kalbar)	Koordinator
3.	Syarif Amin Muhammad, A.Md (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi Partai NasDem DPRD Prov. Kalbar)	Koordinator
4.	Ir. H. Suriansyah, MMA (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Prov. Kalbar)	Koordinator
5.	Meiske Anggrainy, S.Sos, MM (Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov. Kalbar)	Anggota
6.	Ramli Rama (Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov. Kalbar)	Anggota
7.	Thomas Aleksander, S.Sos, M.Si (Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov. Kalbar)	Anggota
8.	Angeline Fremalco, SH (Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov. Kalbar)	Anggota
9.	Fransiskus Ason, SP (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Golkar)	Anggota
10.	DR. H. Edy R. Yacoub, M.Si (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Golkar)	Anggota
11.	Kho Susanti (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai NasDem)	Anggota
12.	Terry Ibrahim, S.Sos, MM (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai NasDem)	Anggota
13.	Cok Hendri Ramapon, S.Sos (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Gerindra)	Anggota
14.	Simon Fetrus (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Demokrat)	Anggota
15.	Yuliani (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi Partai Amanat Nasional)	Anggota
16.	Roby Nazarudin, SH (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi PKB)	Anggota

-5-

17.	Yulianus Asroni, SE (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi PKB)	Anggota
18.	H. Mad Nawir (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi PKS-PPP)	Anggota
19.	H. Fatahillah Abrar, S.Ag, M.Si (Anggota DPRD Prov. Kalbar Fraksi PKS-PPP)	Anggota

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

PRABASA ANANTATUR